



YLBHI



PAPUA DALAM CENGKERAMAN MILITER

Laporan YLBHI tentang
Situasi HAM Papua 2023-2025



PAPUA DALAM CENGKRAMAN MILITER

Laporan Situasi HAM di Papua: 2023-2025

Penyusun

Rizaldi Ageng Wicaksono
Emanuel Gobay

Kontributor

Made Supriatma
LBH Papua
LBH Papua Merauke (Project Base)

Editor

Eti Oktaviani

Layout dan Cover

Docallisme Studio

Penanggung Jawab

Ketua Umum Pengurus YLBHI

Diterbitkan Oleh:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Jalan Diponegoro No.74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320
Website : <https://ylbhi.or.id/>
IG : @yayasanlbhindonesia
X : @YLBHI
Tiktok : @ylbhi

YLBHI
2025

Pengantar Ketua Umum YLBHI

Penderitaan Rakyat Papua bukan hanya tentang represi, tapi juga hegemoni. Pemerintah Indonesia memandang Papua adalah wilayah yang harus disembunyikan dalam ruang gelap, agar eksploitasi bisa terus dilancarkan tanpa hambatan, agar setiap pelanggaran tak diberitakan, agar suara rakyat terus bisa dibungkam.

Kebijakan Indonesia tentang papua adalah kekhususan tentang pehampaan dan negasi akan hak, potret berkepanjangan akan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, ruang stigma, kontestasi kekuasaan antar pihak di Jakarta, ruang kegelisahan yang terus tak kunjung menemukan jawaban.

Jurnalis Asing tak bisa meliput, jurnalis lokal menjadi target serangan dan kekerasan, pelapor-pelapor khusus PBB tak diperkenankan untuk melakukan pemantauan, bahkan influencer dan buzzer digerakkan untuk memberikan dengung dan bising, hingga fakta dan realita tak bisa nyaring.

Laporan ini adalah usaha meretas pembungkaman fakta diatas, menyajikan realita yang seharusnya menjadi berita dan mengubah kesadaran dan kebijakan Pemerintah. Laporan ini selayaknya juga menjadi teman perjuangan bagi rakyat, civitas akademika, pegiat HAM & Demokrasi, Pejuang-pejuang kesetaraan dan keadilan.

Jangan lelah berjuang untuk Papua, Korban-korban, Rakyat, dan segenap Semesta Alam dan seluruh ekosistem kehidupannya!

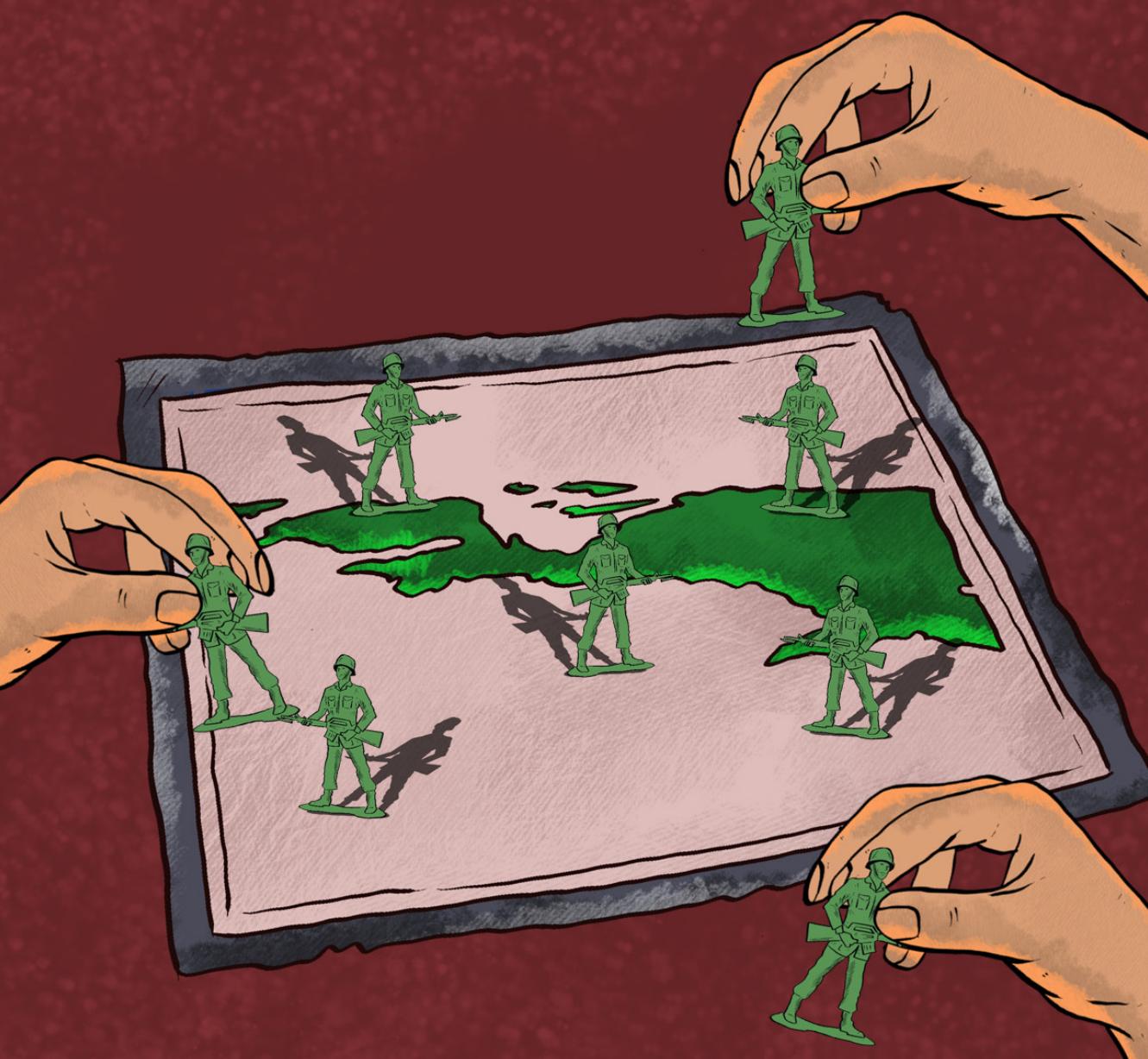
Salam Hormat

Muhamad Isnur

Ketua Umum Pengurus YLBHI

Daftar Isi

Pengantar Ketua Umum YLBHI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Metode Pengambilan Data dan Analisis Data	3
D. Bagan Kerangka Pikir	3
BAB II TEMUAN KONDISI HAM EKOSOB DAN SIPOL DI PAPUA	5
A. Operasi Militer dan Gelombang Pengungsian	5
B. Situasi Ruang Hidup dan Operasi Militer di Papua	15
C. Kebebasan Sipil dan Kekerasan di Bawah Operasi Militer di Papua	21
BAB III KESIMPULAN	31



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak pertama kali operasi militer pada tahun 1961, pemerintahan Indonesia telah terhitung lebih dari 5 dekade lamanya mengaktifkan operasi militer di tanah Papua. Dimulai pada Operasi Trikora (1961) yang ditujukan untuk mengusir Belanda dari tanah Papua. Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Baratayudha (1967) yang merenggut nyawa 3.500 orang. Lalu berlanjut Operasi Wibawa (1969) untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Kemudian Operasi Sadar (1977) yang dilakukan menyusul peningkatan tensi saling serang Tentara Nasional Pembebasan-Papua Barat dengan Tentara Nasional Indonesia di Papua Pegunungan. Divisi Hasanuddin (Sulawesi Selatan) dan Diponegoro (Jawa Tengah) diterjunkan berbarengan dengan batalyon 752 Sorong dan 753 Nabire. Operasi tersebut juga ditegaskan oleh militer sebagai upaya untuk menjaga keamanan menjelang Pemilu 1977. Menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, kemudian disebut sebagai Peristiwa 1977.

Peristiwa 1977 yang oleh Asian Human Right Commision disebut sebagai genosida terabaikan menunjukkan dalam laporannya pada 2013 yang memuat kalimat seperti “operasi militer”, “pembantaian massal”, dan “pemerkosaan”. Korban pembantaian dalam operasi ini sebanyak 5 ribu - 10 ribu orang. Sedikitnya 16 pesawat Bronco OV-10 dari Amerika Serikat dibeli untuk mengebom area Lembah Baliem. Bantuan helikopter Iroquois juga diberikan oleh Australia (Sloan, 2013).

Operasi satu ke operasi lainnya berlanjut. Operasi Sapu Bersih (1981-1982) dilakukan dan sumber menyebutkan setidaknya 1.000 orang di Kabupaten Jayapura dan 2.500 di Kabupaten Paniai telah terbunuh. Terdapat juga Operasi Galang I dan II (1982), dan Operasi Militer Tumpas (1983 dan 1984). Di tahun 1998, ketika Soeharto turun tahta, operasi militer di Papua dicabut. Pengiriman tentara terus berlanjut. Hingga saat ini operasi militer dilancarkan tanpa status hukum yang jelas.

Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid memberikan ruang demokrasi kepada Rakyat Papua yang ditandai dengan terselenggarakannya Kongres Rakyat Papua II di Gor Cenderawasih Jayapura pada tahun 2000 yang merekomendasikan pembentukan Presidium Dewan Papua dan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay terpilih menjadi Ketua Presidium Dewan Papua. Ia sering menyuarakan hak menentukan nasib sendiri ketika menjabat sebagai Ketua Presidium. Di tanggal 10 November 2001, sepulang dari menghadiri perayaan Hari Pahlawan di markas Komando Pasukan Khusus, Theys diculik, sehari setelahnya jasadnya ditemukan di dalam mobilnya yang terperosok ke jurang di Skouw, supirnya Aristoteles Masoka tidak ditemukan. Munir mengatakan bahwa meninggalnya Theys merupakan suatu konsekuensi dari pola pendekatan yang dilakukan TNI (Anonim, 2002). Dokumen rahasia Depdagri tentang “Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Papua

untuk Merdeka dan Melepaskan Diri dari NKRI" menunjukkan bahwa ada operasi pengkondisian wilayah untuk merespon penolakan Otonomi Khusus. Sebuah penolakan yang juga disuarakan dengan lantang oleh Theys Eluay (SETARA, 2015).

Pengiriman tentara terus berlanjut di era Reformasi. Hingga saat ini operasi militer dilancarkan tanpa status hukum yang jelas. Di tahun 2018, Presiden Jokowi (2014-2024) melancarkan Operasi Terpadu. Di dalamnya terdapat berbagai macam operasi yang menyebar di berbagai wilayah di Papua. Di tahun 2021, Menteri Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD kala itu menyatakan bahwa Pemerintah akan menggunakan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah keamanan di Papua, yaitu mengedepankan "operasi teritorial" bukan "operasi tempur".

Namun, pendekatan tersebut tak nampak perbedaanya. Kejadian disiksanya warga Papua di Kabupaten Puncak yang dimasukkan ke dalam drum, disayat, dipukul, dipentung dengan stik pada Februari 2024 menunjukkan itu. Darah dapat terlihat mengucur dari beberapa titik. Data lainnya juga menunjukkan bahwa *extra judicial killing* telah mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 - 2024. Di tahun 2022, 4 warga Nduga dimutilasi oleh 10 orang yang 6 diantaranya adalah prajurit tentara. Bahkan di tahun 2023, 2 tahun pasca Mahfud MD menyatakan perbedaan pendekatan, angka *extra judicial killing* tercatat mencapai 60 korban (UCDP, 2024).

Aparat militer Indonesia selalu memiliki alasan untuk mengerahkan militer ke Pulau Papua dari daerah lain. Menjelang Pemilu 2024, mirip seperti yang dilakukan dalam Peristiwa 1977, dalm pengerahan militer dilakukan untuk mengamankan pemilu. TNI menyatakan bahwa dalam Pemilu 2024 terdapat ancaman dari kelompok yang berniat menggagalkan Pemilu presiden di Papua (Loen, 2024). Namun pasca Pemilu 2024 itu sendiri, pengerahan militer non-organik tidak dihentikan. Mereka dimobilisasi dan menempati sejumlah fasilitas umum, rumah ibadah, dan juga sekolah seperti yang baru-baru ini terjadi di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua (Aswara, 2025). Menurut Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Candra Kurniawan, penempatan militer tersebut dilakukan untuk "melindungi masyarakat". Namun apakah benar penempatan tersebut dilakukan untuk kepentingan tersebut? Atau justru melanggar banyak aspek hak asasi manusia rakyat Papua?

Laporan ini akan mengulas berbagai pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Tidak hanya yang terjadi di Papua, tapi juga yang terjadi kepada mahasiswa Papua yang belajar di luar Papua. Laporan ini menjadi penting untuk mengabarkan kepada khalayak, terkait kekerasan dan Pelanggaran HAM yang terjadi selama ini kepada Orang Asli Papua, di tengah ketiadaan berita terkait kondisi riil situasi di Papua.

Preposisi yang coba dibangun dalam laporan ini adalah penempatan militer di tanah Papua justru mengintensifkan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua. Ini kemudian didukung secara sistematis oleh aparat ketertiban negara lainnya, seperti polisi di daerah-daerah luar Papua yang mencoba untuk menyumbat suara rakyat Papua di wilayah-wilayah luar Papua dengan cara mengakses hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pengerahan militer di Papua terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Papua?
2. Bagaimana dampak pengerahan militer di Papua terhadap hak sipil dan politik rakyat Papua?

C. Metode Pengambilan Data dan Analisis Data

Data laporan ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang bersumber dari data penanganan kasus LBH Papua bersama dua LBH Pos di Papua. Selain data penanganan kasus LBH Papua, data juga akan dikumpulkan dari 17 LBH Kantor lainnya, yang menangani kasus penghalang-halangan berpendapat dan berekspresi Mahasiswa asal Papua yang sedang berkuliah di luar Papua;
2. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diambil dari bahan-bahan bacaan yang relevan seperti pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, buku-buku, artikel, berita-berita baik cetak maupun online (internet), dan lain-lain.

Segala data yang telah terkumpul, akan diolah kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghitung dan mendalami kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 2023 - 2025, menghitung korban, jenis hak yang dilanggar, dan lain-lain.

D. Bagan Kerangka Pikir

Pengerahan Militer ke Papua

Kasus Pelanggaran HAM di Papua Tahun 2023 - 2025

<p>Bagaimana Situasi Ruang hidup dan Operasi Militer di Papua</p> <ol style="list-style-type: none">1. Analisis Pengerahan Militer ke Papua dan Dampaknya pada Situasi Perampasan Ruang Hidup2. Situasi Perampasan Ruang Hidup dikaitkan dengan berbagai kebijakan pembangunan Nasional3. Situasi Bisnis Militer di Papua	<p>Bagaimana Kebebasan Sipil dan Kekerasan di Bawah Operasi Militer di Papua</p> <ol style="list-style-type: none">1. Analisis Pengerahan Militer ke Papua dan Dampaknya pada Kekerasan dan Kebebasan Sipil2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi3. <i>Ekstra Judicial Killing</i> → tanpa peradilan
---	--



BAB II

TEMUAN KONDISI HAM EKOSOB & SIPOL DI PAPUA

A. Operasi Militer dan Gelombang Pengungsian

Sepanjang Joko Widodo menjadi presiden, satu dekade lamanya, ia berkunjung sebanyak 18 kali ke Papua. Ia menjadi Presiden Indonesia yang paling sering menginjakkan kaki ke tanah Papua. Ini bukan tanpa sebab. Di banyak kesempatan pidatonya, Jokowi sering menyebutkan investasi sebagai kunci kesejahteraan. Di masa Covid-19 melanda, Jokowi menyatakan bahwa investasi adalah salah satu kunci pemulihan ekonomi. (Kemensetneg, 2021).

Di Papua, konsesi area tambang telah mencapai 1.180.150 ha dengan komoditas kebanyakan adalah emas (Nusantara Atlas, 2025). Di sisi lain, Kabupaten Merauke dan Sorong tengah menghadapi ekspansi terus menerus industri perkebunan kelapa sawit dan kayu. Ekspansi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat adat. Sebagai contoh adalah masuknya perusahaan PT Papua Berkat Pangan di tanah ulayat Marga Amotey dari Suku Mandobo di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Ada pula masuknya PT Indo Asiana Lestari yang mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 ha di kawasan hutan adat Marga Woro Suku Awyu.

Pemberian izin-izin ini terutama teraksesasi pasca Jalan Trans-Papua-proyek penghubung bagian Utara dan Selatan, Timur dan Barat telah beroperasi. Proyek-proyek rezim yang gagal di sektor pangan di Kabupaten Merauke di bawah program MIFEE (2012) akhirnya menjadi sasaran konversi besar-besaran menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit (Zakaria, 2011). Ini dilakukan tanpa pengerahan militer besar-besaran.

Menangnya Prabowo dalam Pilpres 2024 semakin meningkatkan kepercayaan diri militer masuk ke ranah sipil. Kertas posisi YLBHI dalam momentum 1 tahun rezim Prabowo menunjukkan bahwa rezim hari ini mengarah pada apa yang disebut oleh Tansel (2019) sebagai neoliberalisme otoriter dan militer sebagai salah satu alat sekaligus penerima manfaatnya. Ini dicirikan dengan adanya sentralisasi eksekutif dalam tata kelola negara, dimana aparatur negara digunakan untuk memfasilitasi aliran modal. Ini kemudian secara otomatis membatasi mekanisme kontestasi demokratis dan penyampaian pendapat akan ketidak-puasan.

Kini, keterlibatan TNI semakin meluas dan terang-terangan. Fenomena ini terjadi sejak Prabowo Subianto menjadi presiden. Langkah untuk melakukan revisi kilat UU TNI untuk memperluas kewenangan TNI dalam wilayah-wilayah yang diatur dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), misalnya, telah memungkinkan para anggota TNI untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah sipil secara lebih mendalam.

TNI-Angkatan Darat juga akan menambah jumlah kesatuan-kesatuan teritorialnya dalam skala yang sangat masif. Seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) pada 2025, dan rencana pembentukan selanjutnya hingga mencapai jumlah kabupaten/kota di Indonesia pada 2029. Selain itu, TNI-Angkatan Darat juga akan membuat Kompi-kompi Produksi di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim). Batalyon dan Kompi ini akan memiliki unit-unit pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan.

Rencana-rencana tersebut, sejatinya sudah ada di Papua. Agustus lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi. Sjafrie menyatakan bahwa proyek ini adalah prototipe dari rencana 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang fungsinya **“harus mahir menembak ... namun di saat yang sama, mereka juga bisa dikumpulkan menjadi satu batalyon pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan”** (Kementerian Pertahanan, 2025).

Di Papua, 3 Yonif mendarat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke pada bulan November 2024. Yonif ini adalah batalyon task force di bawah kontrol operasional. Tentunya, berbeda dengan batalyon yang disiapkan untuk BIT Pembangunan dengan rekrutmen, Yonif di Kampung Wanam didatangkan dari markas-markas yang sudah ada. Jumlahnya mencapai 2.073 prajurit dengan masing-masing batalyon diisi oleh 691 tentara yang berasal dari Kodam XVII/Cendrawasih. Di food estate, mereka hadir sebagai aktor Optimalisasi Lahan (Imran, 2025). Secara keseluruhan, setidaknya 29 Yonif TNI AD yang ada di Papua. Jumlah rata-rata setiap Yonif terdiri dari 450 prajurit. Namun di Merauke sepertinya mendapatkan perlakuan khusus.

“Secara keseluruhan, setidaknya 29 Yonif TNI AD yang ada di Papua. Jumlah rata-rata setiap Yonif terdiri dari 450 prajurit. Namun di Merauke sepertinya mendapatkan perlakuan khusus.”

Tidak hanya 2.073 prajurit baru dikirimkan ke Merauke. Kodam baru dibangun di Provinsi tersebut. Mabes TNI menyatakan bahwa pembentukan Kodam baru dilakukan untuk merelokasi satuan-satuan yang awalnya dibawahi oleh Kodam eksis.

Di sisi lain, pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) yang dianggap esensial oleh mereka tak kunjung dipenuhi. Masih di Merauke misal, aliansi Ikatan Pedagang Pasar Mama-mama Asli Papua (IPM2AP) yang telah lama menyuarakan kebutuhannya terhadap pasar yang layak dari 2023, hingga hari ini tidak kunjung dipenuhi (LBH Papua, 2025). Sikap ini berkebalikan dengan pemberian izin tambang nikel untuk PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang di kawasan Geopark Raja Ampat. Keberadaan proyek tersebut

ditolak oleh masyarakat sekitar. Kendati akhirnya, perusahaan yang sempat dibekukan izinnya ini kembali beroperasi (Wicaksono, 2025).

Jika kita melihat desakan dibangunnya pasar, IPM2AP bertumpu pada amanat Undang-undang No 21 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar pembentukan Peraturan Presiden No 24 Tahun 2023 tentang rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Diatur dalam Pasal 1, Majelis Rakyat Papua bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua, DPRP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK memiliki mandat untuk menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan.

Jalan tol, tambang, sawit, dan juga mobilisasi militer, apa sebenarnya tujuan dari semua program ini? Per bulan Maret 2025 tingkat kemiskinan di Indonesia rata-rata adalah 8,47%. Sedangkan di Papua, setiap provinsinya memiliki tingkat kemiskinan paling rendah 17,95% (Papua Barat Daya), dan tertinggi 30,03% (Papua Pegunungan). Papua Pegunungan adalah provinsi dimana Tambang Grasberg beroperasi di bawah PT Freeport Indonesia.

No.	Provinsi	Angka Kemiskinan
1.	Papua Pegunungan	30,03 %
2.	Papua Tengah	28,90 %
3.	Papua Barat	20,66 %
4.	Papua Selatan	19,71 %
5.	Papua Barat Daya	17,95 %
6.	Provinsi Papua	19,16 %

Tabel 1. Kemiskinan di Papua dalam angka (Puspita, 2025)

Papua Tengah masih menjadi konsentrasi pengerahan militer hingga hari ini. Kemiskinan dalam angka dan operasi militer adalah pembuka untuk kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan dampaknya terhadap Orang Asli Papua.

“Per bulan Maret 2025 tingkat kemiskinan di Indonesia rata-rata adalah 8,47%. Sedangkan di Papua, setiap provinsinya memiliki tingkat kemiskinan paling rendah 17,95% (Papua Barat Daya), dan tertinggi 30,03% (Papua Pegunungan).”

Di bulan Februari 2024, Panglima TNI Jend. Agus Subianto membentuk operasi militer yang disebut sebagai Satuan Tugas Operasi Habema (Satgas Ops

Habema), Ini merupakan komando operasi gabungan tiga matra (AU, AL, dan AD). Habema, merupakan akronim dari “Harus Berhasil Maksimal”. Di bulan April 2024, Jend. Agus Subianto mengubah terminologi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“ Di bulan April 2024, Jend. Agus Subianto mengubah terminologi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).”

Dari sudut pandang hukum, penyematan Organisasi Papua Merdeka ini akan memperluas sasaran operasi-operasi gabungan di tanah Papua. Organisasi sipil yang menyatakan perjuangan kemerdekaan Papua, dapat menjadi sasaran. Penggunaan istilah OPM juga berimplikasi terhadap diakuiunya eksistensi kelompok-kelompok pro-kemerdekaan sebagai entitas politik yang berusaha untuk mendirikan negara sendiri. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar kala itu mengatakan bahwa TNI berhak untuk merespon dengan tegas tentara atau kombatant (OPM) sesuai hukum humaniter (Tempo, 2024). Lalu bagaimana dampaknya?



2023

500 warga Fak-fak mengungsi pada 16 Desember 2023 setelah 23 orang tidak dikenal menganiaya Kepala Distrik Kramamongga Darson Hegemur hingga tewas dan membakar kantor distrik dan gedung SMPN Negeri 4



554 warga Yahukimo mengungsi karena adanya operasi militer pada 21 Agustus 2023.



Operasi militer penyelamatan Pilot Susi Air membuat masyarakat sipil yang berada di Distrik Paro dan Meborok dan perkampungan lain di sekitarnya memilih mengungsi ke kota maupun hutan.



91 warga Pegunungan Bintang mengungsi (23 September)



Sekitar 200 penduduk dari 10 desa di Distrik Gome, Kabupaten Punak mengungsi ke Gereja dan di bawah perlindungan Batalyon Infanteri 300/Brawijaya



Agustus



Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air di Mugi-Mam, Nduga (Feb 2023 – Sept 2024)



September

Adanya tentara non-organik ditempatkan di Ilaga Kabupaten Puncak (September)



Desember

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Ke Jayapura



2024



Terjadi konflik di Intan Jaya di bulan Januari. Konflik berkembang antara warga dan pasukan gabungan TNI-Polri setelah Masyarakat sekitar menolak Pembangunan patung Yesus Kristus dan kasak-kusuk tambang Blok Wabu. 1 Tewas ditembak tentara/ 500 orang mengungsi.



Lima distrik menjadi episentrum kontak senjata TPNPB dan TNI-Polri. Sekitar 2500 warga sipil dari 5 distrik Kabupaten Paniai mengungsi



Pembangunan gudang logistic proyek Pemerintah Pusat mendorong pengerahan militer. 3.000 warga Distrik Agandugume dan Oneri, Kab. Puncak Papua mengungsi

Februari

TNI membentuk Satgas Habema



April

Panglima TNI mengubah terminologi KKB menjadi OPM



Juni

Panglima TNI resmikan 5 Yonif di Papua



Okttober



8 Desember, militer pasukan militer masuk Distrik Oksob dan menduduki kamping. 3.318 penduduk dari 5 kampung Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang mengungsi



27 November kontak senjata antara TPNPB dan TNI-Polri terjadi. 106 warga di Kampung Bamuswaiman dan Blanfot, Kabupaten Tambraw mengungsi

Desember

Menhan dan Panglima TNI mengunjungi Timika dan menemui ribuan prajurit.



2025

Januari

Maret

Juni

Juli

Agustus

September



konflik bersenjata di Kab. Papua Tengah mulai tereskala



12,859 warga Intan Jaya mengungsi pada 31 Maret 2025. 11 Pengungsi dilaporkan meninggal



900 rumah tangga dari distrik Agadugume, Puncak dan Oneri meninggalkan desa mereka



Bentrokan bersenjata antara Juli dan Agustus 2025 memicu gelombang baru pengungsian massal di kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan



Bentrokan bersenjata antara Juli dan Agustus 2025 memicu gelombang baru pengungsian massal di kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan



Di Paniai 1.130 orang mengungsi setelah aparat keamanan menduduki sebuah pusat kesehatan masyarakat



Operasi militer di distrik Sugapa, berdampak pada lima desa adat. Militer Indonesia dilaporkan menduduki Sekolah Dasar YPPK Jalai dan Gereja Katolik Fransiskus Jalai



Menhan mengunjungi Nduga dan Boven Digul



Kodam XXIV/Mandala Trikora, Merauke diresmikan





Kerusuhan di distrik Elelim, ibu kota kabupaten Yalimo, menyebabkan pengungsian. 684 penduduk mengungsi dalam 4 gelombang



238 orang di Teluk Bintuni mengungsi ke hutan setelah bentrokan bersenjata



2.300 warga meninggalkan rumah mereka di Lanny Jaya setelah helikopter militer melakukan serangan dari udara



Sebanyak 2000 ribu warga pengungsi korban konflik TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) sejak 5 Oktober 2025 terancam kelaparan akibat kekurangan kebutuhan makanan dan minuman. 1 Orang warga sipil masih hilang.



9 bulan konflik di Kab. Papua Tengah, Para pengungsi dari Puncak tinggal di beberapa lokasi, dengan konsentrasi terbesar 9.261 pengungsi internal di tenda-tenda pengungsian di Ilaga, sementara sekitar 1.000 pengungsi lainnya tersebar di Nabire dan Timika.



Pengeboman udara berulang kali terhadap markas TPNPB dan kamp-kamp pengungsi internal di distrik Kiwirok, antara tanggal 6 dan 12 Oktober 2025, yang menggunakan jet tempur, pesawat tanpa awak, dan bahan peledak berat yang dilengkapi pecahan peluru untuk menimbulkan kerusakan lebih parah pada manusia. Sebuah serangan udara pada 12 Oktober dilaporkan diarahkan ke rumah-rumah warga.

September

Oktober



Titik-titik Pengungsi Tahun 2023-2025

Tambraw
106 Pengungsi

Intan Jaya
13.359 Pengungsi

Lany Jaya
2.300 Pengungsi

Yalimo
684 Pengungsi

Puncak
13.461 Pengungsi

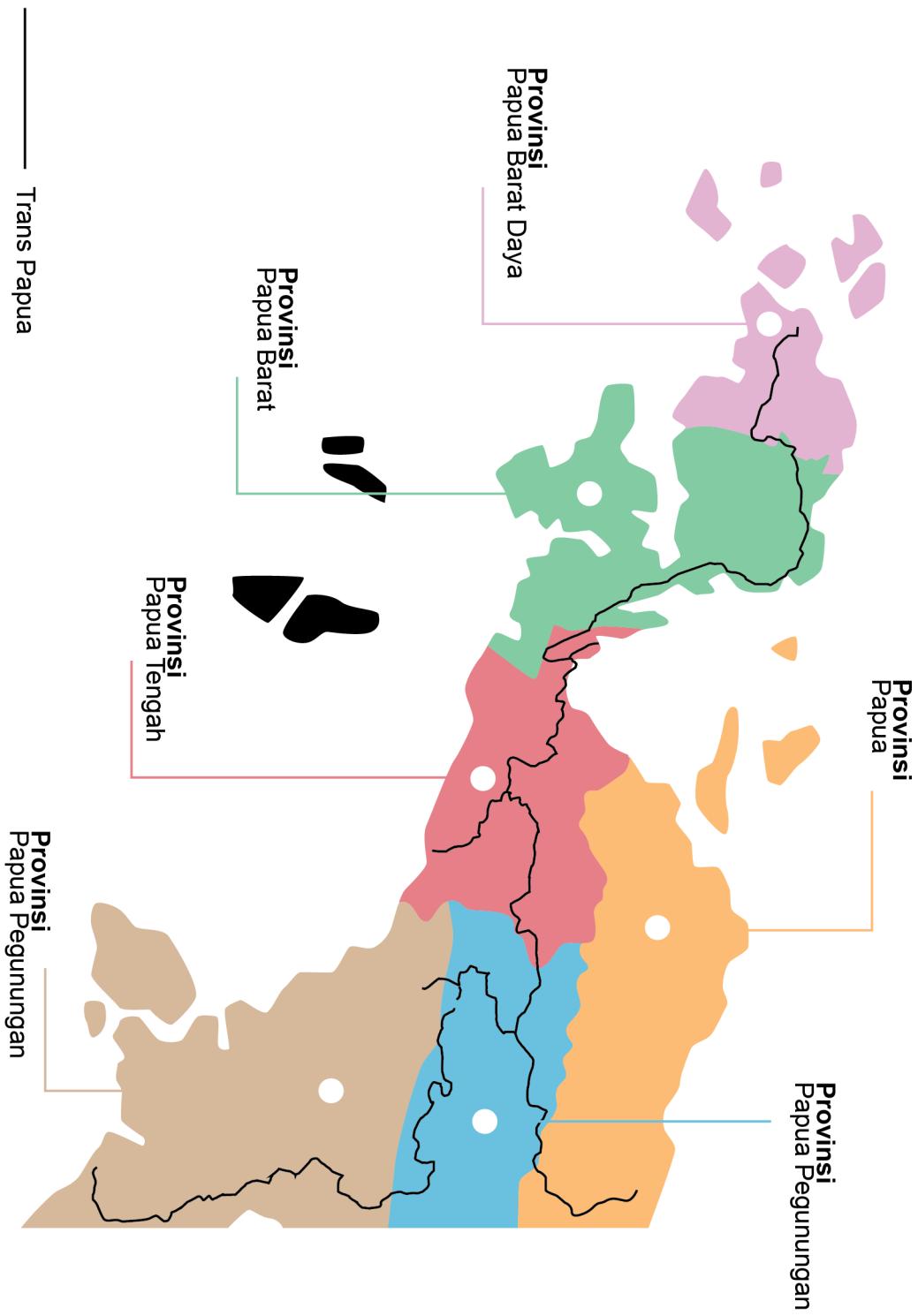
Pegunungan Bintang
3.409 Pengungsi

Teluk Bintuni
238 Pengungsi

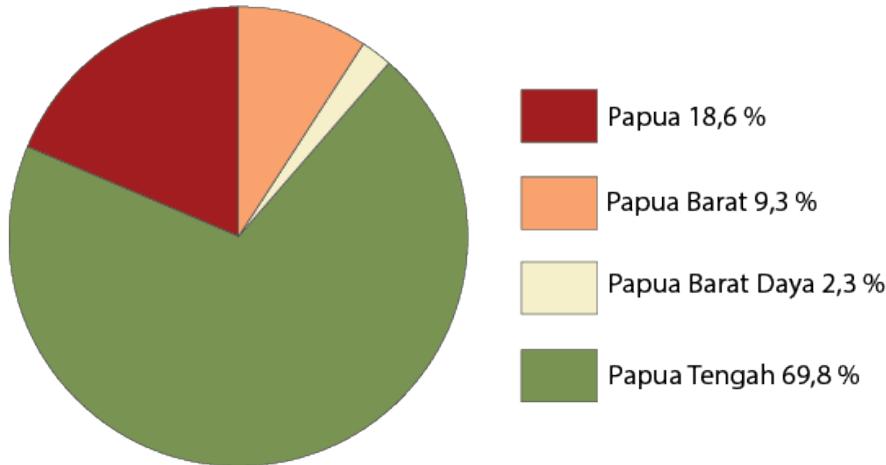
Paniai
3.630 Pengungsi

Yahukimo
554 Pengungsi

Fak Fak
500 Pengungsi



Kami mengumpulkan informasi mengenai 42 konsesi tambang di seluruh Papua. Ini terdiri dari tambang nikel, hingga komoditas mineral yang hingga saat ini masih menjadi primadona kelas borjuis: emas. Mencapai 1.180.150 ha lahan konsesi, 30 dari 42 konsesi berada di area Provinsi Papua Tengah. Kembali pada tabel sebelumnya, angka kemiskinan di Papua Tengah per-Maret 2025 mencapai 28,9%. Di sisi lain, Papua Pegunungan yang merupakan provinsi tanpa konsesi tambang menyumbang angka kemiskinan sebesar 30,03%. Kehadiran tambang, setidaknya tidak memberikan jarak berarti untuk menurunkan angka kemiskinan.



Grafik 1. Persebaran Konsesi Tambang di Papua Berdasarkan Data IUP (2025)

Konsesi tambang dan kemiskinan diidealkan sebagai dua kutub yang bisa saling menegaskan. Keberadaan tambang dinilai sebagai pembawa kesejahteraan. Di Indonesia, ide ini bahkan termuat dalam Undang-undang No 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada bagian menimbang butir angka 1 dijelaskan "...mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam ... untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan..."

Namun, persinggungan antara tambang dan kemiskinan di Papua justru menghasilkan resistensi OAP untuk tunduk terhadap pola pembangunan demikian. Resistensi dalam angka ini nanti akan diulas pada bab selanjutnya. Pada bagian ini kita dapat melihat operasi militer sebagai bagian upaya untuk mengamankan tambang dari resistensi bersenjata. Kami akan memaparkan potret kasus yang baru saja terjadi di bulan Mei 2025.

Di bulan April 2025, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim bahwa mereka telah membunuh 17 penambang emas ilegal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. TPN-OPM menuduh bahwa 17 penambang tersebut merupakan informan atau "suanggi". Salah satu keluarga korban membantah dan mengatakan bahwa alasan korban menjadi pekerja tambang adalah dorongan ekonomi. Dilaporkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, aktivitas tambang ilegal di Papua dan

wilayah-wilayah pemekarannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah setempat terus memberikan izin-izin tambang rakyat tanpa mempertimbangkan keselamatan warga sipil di area konflik. Dengan pemberian izin tambang, mobilisasi buruh pertambangan juga dilakukan secara sistematis dengan diangkut menggunakan helikopter (BBC, 2025).

Di bulan Mei, TNI meningkatkan operasi militer yang disebut sebagai Komando Operasi Habema. Operasi ini terutama dilakukan di daerah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah. Di tanggal 14 Mei 2025, Tentara Nasional Indonesia mengklaim bahwa prajuritnya berhasil melumpuhkan 18 anggota TPNPB-OPM di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Di sisi lain, tokoh agama di Papua, Pendeta Elisa Wandegau tewas tertembak di bagian vital di depan pintu masuk gereja saat mengarahkan warga kampung masuk untuk berlindung (Faturahman, 2025). Bersamaan dengan itu, ribuan masyarakat adat mengungsi.



Gambar 1. Warga melakukan perjalanan mengungsi ke hutan setelah desanya menjadi medan kontak senjata TNI dan TPNPB-OPM (Sumber: Human Rights Monitor)

Pengungsi di Nabire yang pergi dari Puncak sebagian besar merupakan petani. Perginya mereka meninggalkan rumah artinya meninggalkan ladang-ladang garapannya. Di tempat pengungsian, mereka sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah—provinsi maupun kabupaten—organisasi kemanusiaan juga absen dalam memberikan bantuan tersebut. Warga pengungsi yang terdiri dari anak, ibu, dan laki-laki ini bergantung nasib pada gereja yang memiliki lahan olahan luas.

Masalah juga terjadi terhadap anak-anak yang seharusnya mengenyam dunia pendidikan. Di daerah itu akses terhadap sekolah didapatkan berdasarkan domisili yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP). Para pengungsi anak-anak yang berasal dari Puncak tidak dapat serta merta mengakses sekolah di Nabire. Operasi militer telah melanggengkan kemiskinan antar generasi.

Para pengungsi dari Puncak mulai berpindah ke Nabire sejak 2023. Dari tahun itu juga, TNI-Polri ditempatkan di desa mereka. Ditempatkannya prajurit TNI-Polri ini yang menjadi alasan mereka menetap selama dua tahun.

Sedangkan warga yang masih bermukim di Puncak dan Puncak Jaya, masyarakat yang biasanya berkebun secara komunal dibatasi aktivitasnya oleh TNI-Polri. Mereka hanya dapat berkebun dari pukul 8 pagi hingga 2 siang. Aparat keamanan juga melarang warga untuk berkebun dengan menggunakan parang.

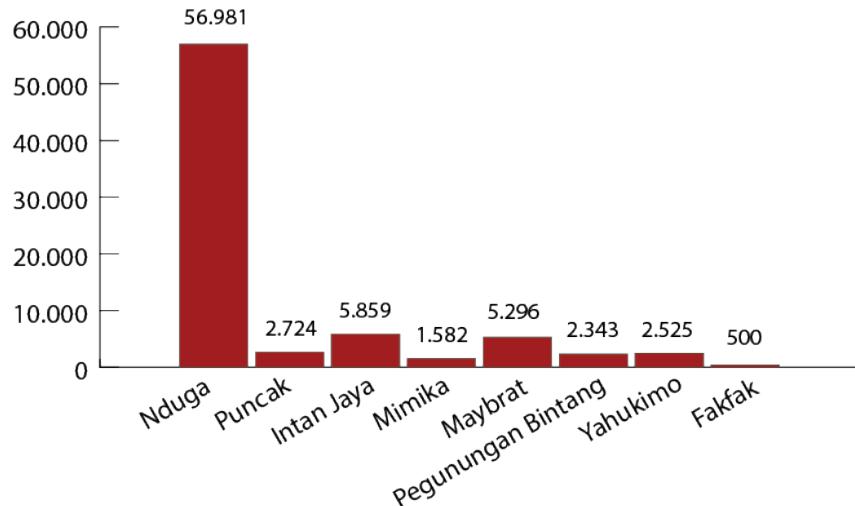
Kelindan Operasi Militer terhadap Hak Hidup dan Hak atas Rasa Aman Rakyat Papua

“ Tentara menempati fasilitas-fasilitas publik. Di Sinak, aparat menempati gudang logistik milik pemerintah daerah. Di Momor, aparat bahkan tinggal di dalam gereja.”

Dekatnya militer dengan pemukiman warga ini memberikan trauma psikologis terhadap OAP. Disampaikan oleh informan, gereja sering digerebek dan aparat masuk tanpa izin, memeriksa jemaat bahkan memukul pendeta dan menodong dengan senjata. Beberapa pendeta bahkan dituduh sebagai “hamba Tuhan OPM”. Tak jarang aparat melakukan penembakan terhadap warga sipil. Di tanggal 6 Maret 2023, Nius Tabuni yang merupakan kepala sekolah PPG Sinak ditembak oleh aparat ketika Tengah mencari kayu bakar dengan dua anaknya. Ia mengalami luka tembak di dua bagian tubuh. Di tahun ini di Mewoluk, seorang ibu dan dua anaknya tertembak. Ini adalah awal dari masalah yang lebih besar lagi: *extra judicial killing*.

Di tahun 2022, Makhlon Tabuni ditangkap dan disiksa karena tuduhan merampas senjata. Makhlon yang merupakan seorang pelajar, meninggal dunia. Di bulan Maret 2023, operasi gabungan 500 personel TNI-Polri dilakukan di Kampung Makulong dan Muak. Seorang ibu Bernama Tarine Murib ditembak dan dimutilasi. Selain itu, tujuh orang luka-luka, termasuk bayi. Di Puncak Jaya pada tahun 2024, tiga warga sipil ditembak mati tanpa pemeriksaan. Masyarakat kemudian marah dan membakar mobil tentara. Kasus ini diselesaikan dengan pemerintah daerah membayar aparat untuk menghentikan represi.

Data dari LBH-YLBHI Papua menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, jumlah pengungsi internal mengalami peningkatan. Total keseluruhan mencapai 76.228 orang di 7 kabupaten. Provinsi Papua Tengah menyumbang jumlah pengungsi internal terbanyak dengan 65.564 pengungsi. Berikut dibawah ini gambarannya.



Grafik 2. Jumlah Pengungsi Internal (2018 - 2023) (Sumber: LBH Papua)

Di tahun 2024, setidaknya 6.000 warga di tiga kabupaten (Intan Jaya, Paniai, Puncak) Papua Tengah mengungsi. Di Provinsi Papua Pegunungan setidaknya 3.318 warga Kampung Oketumi, Mimin, Alutbakon, Atenar, dan Bumbakwon di Distrik Oksop dilaporkan mengungsi karena konflik senjata. Konflik bersenjata ini terbukti membahayakan bagi warga sipil dan sangat mematikan dengan dibuktikan oleh angka. Sepanjang tahun 2018 - 2024, 386 orang meninggal dalam sebuah konflik bersenjata.¹ Dari keseluruhan tersebut, 306 diantaranya adalah korban *state-based conflict* dan sisanya dikategorikan sebagai *one-sided violence*.² Kematian ini akan berkait kelindan dengan praktek *extrajudicial killing* yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian Kebebasan Sipil dan Kekerasan di Bawah Operasi Militer di Papua.

Di tahun 2025, konflik bersenjata di Papua Tengah mulai bereskalasi sejak Januari. Berjalan 9 bulan lamanya, lebih dari 10.261 warga sipil mengungsi di beberapa lokasi. Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Ilaga dengan jumlah 9.261 orang sedangkan sekitar 1.000 lainnya tersebar di Nabire dan Timika. Di bulan Juni, 900 rumah tangga dari distrik Agandugume dan Oneri meninggalkan kampung mereka setelah konflik bersenjata terjadi. Di bulan Agustus, konflik bersenjata di Yahukimo menghasilkan gelombang pengungsian yang dilaporkan oleh Human Right Monitor melaporkan sebanyak 1.890 penduduk mengungsi (Human Rights Monitor, 2025). Di bulan September, setidaknya 1.130 orang di Paniai mengungsi setelah aparat keamanan menduduki pusat kesehatan masyarakat. Pendudukan fasilitas sipil ini menjadi pola. Di bulan yang sama, militer dalam sebuah operasi di Distrik Sugapa menduduki Sekolah Dasar YPPK Jalai dan Gereja Katolik Fransiskus Jalai.

¹ Konflik bersenjata antara dua pihak yang memperebutkan legitimasi kekuasaan pemerintahan atau dan/atau wilayah, di mana setidaknya salah satunya adalah pemerintah suatu negara, mengakibatkan setidaknya 25 kematian terkait pertempuran dalam satu tahun kalender. [UCDP Definitions - Uppsala University](#)

² Kekerasan sepihak adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh pemerintah suatu negara atau oleh kelompok yang secara resmi terorganisir terhadap warga sipil yang mengakibatkan setidaknya 25 kematian. Pembunuhan di luar proses hukum yang terjadi dalam tahanan dikecualikan. Korban dalam kategori ini merujuk khusus pada individu yang tidak dapat membela diri. [ucdp-onesided-172.pdf](#)

Dampak Konflik Bersenjata di Papua (2018–2025)

Pengungsian Tahun 2024



6.000 warga

mengungsi di Papua Tengah (Intan Jaya, Paniai, Puncak).



3.318 warga

mengungsi di Papua Pegunungan (Oketumi, Mimin, Alutbakon, Atenar, Bumbakwon – Distrik Oksop).

Korban Jiwa (2018-2024)



386 orang meninggal akibat konflik bersenjata.



Penyebab: **konflik bersenjata** yang mengancam warga sipil.



306 korban berasal dari state-based conflict.

Lonjakan Pengungsian Awal 2025



>10.261 warga sipil

Sejak Januari 2025: warga sipil mengungsi di Papua Tengah.



9.261 pengungsi.

Ilaga: konsentrasi terbesar



+1.000 pengungsi

tersebar di Nabire dan Timika.

Peristiwa-peristiwa Kunci 2025

Juni

900 rumah tangga dari Agandugume & Oneri mengungsi akibat konflik.

Agustus

Di Yahukimo, konflik memicu **1.890 warga mengungsi** (Human Rights Monitor, 2025)

September

1.130 warga Paniai mengungsi setelah aparat menduduki Puskesmas.

Militer menduduki **SD YPPK Jalai & Gereja Katolik Fransiskus Jalai** (Distrik Sugapa).

Di bulan Oktober, 238 warga di Teluk Bintuni mengungsi setelah kampungnya menjadi medan konflik bersenjata. Di Lanny Jaya bulan yang sama, 2.300 penduduk meninggalkan rumahnya setelah helikopter militer melakukan serangan udara. Sedangkan sekitar 2000 warga pengungsi yang meninggalkan rumahnya karena konflik bersenjata di Soanggama lalu, terancam kelaparan karena kekurangan makanan.

Para pengungsi biasanya meninggalkan wilayah adatnya dan masuk ke wilayah adat lain. Situasi ini berpotensi menghasilkan konflik horizontal. Masalah berlapis juga terjadi ketika pengungsi menumpang di rumah-rumah para kerabatnya. Dimana pembagian konsumsi makanan sering menjadi masalah ketika satu rumah harus ditempati lima hingga tujuh kepala keluarga.

Laporan di tahun 2023 dalam kasus kematian Aminera Kabak memberikan gambaran mengenai masalah ekonomi menjadi sangat pelik ketika para pengungsi harus hidup dalam ketakutan.



Gambar 2. 12 warga pengungsi dari Muara Bontoh. Sumber: Jubi/Wahyu Dekai

Setidaknya, ada 674 warga Muara Bontoh yang telah mengungsi ke kawasan perkotaan Dekai pasca kontak tembak 21 Agustus 2023. Mereka tersebar di empat lokasi yang ada di kawasan perkotaan Dekai, dan telah menerima sejumlah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo, namun belum mendapat pelayanan kesehatan. Sepanjang September - Oktober 2023, mereka tinggal di pengungsian dan mengalami kelangkaan makanan. Beberapa di antara mereka nekat untuk kembali ke kebunnya untuk mengambil bahan makanan. Aminera Kabak salah satunya.

“ *Extrajudicial Killing* tersebut menghasilkan trauma kolektif yang menahan warga lainnya untuk mengakses kebun-kebunnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Memulai perjalanan ke kebun dengan jalan kaki selama satu jam sejak pukul enam pagi, jasad Aminera Kabak ditemukan di kebunnya pada pukul 11:00 WIT. Jasad yang kemudian dibawa ke RSUD Yahukimo diperiksa. Pihak rumah sakit menemukan adanya luka robek bekas tusukan senjata tajam di bagian vagina korban. *Extrajudicial Killing* tersebut menghasilkan trauma kolektif yang menahan warga lainnya untuk mengakses kebun-kebunnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rantai masalah ekonomi yang riil terjadi setelah konflik bersenjata bergulir.

C. Kebebasan Sipil dan Kekerasan di Bawah Operasi Militer di Papua

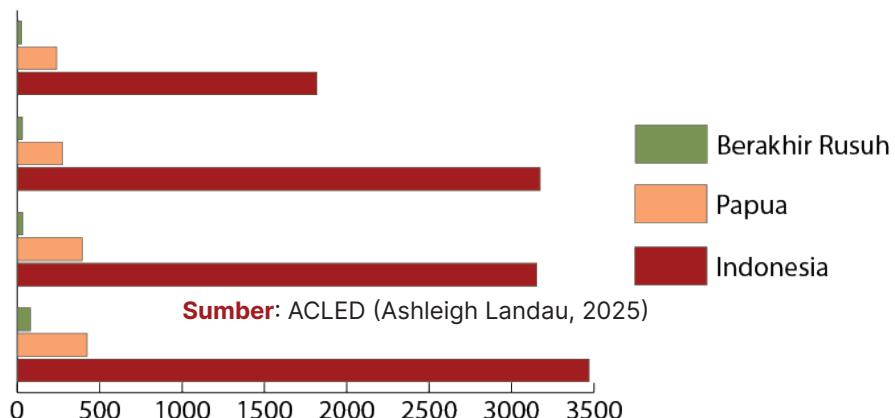
Respon Negara Terhadap Demonstrasi

Pada 28 Oktober 2025, ribuan massa terdiri dari OAP memadati jalan-jalan ibukota Intan Jaya, Papua Tengah. Poster-poster dibentangkan dengan tulisan "Tarik Militer dari Intan Jaya dan Seluruh Tanah Papua", poster lain menyerukan "Stop Perkosa Kami". Aksi tersebut dilakukan setelah pada tanggal 15 Oktober 2025, TNI membunuh 14 orang yang dinyatakan sebagai kambatan. Salah satu media massa nasional menyatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan ketika TNI hendak menuju wilayah Soanggama "untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman" TPNPB-OPM (Aditya & Belarminus, 2025). Sehari sebelumnya di Jayapura, ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Se-Kota Jayapura, Papua melancarkan demonstrasi di kotanya. Aksi tersebut dilancarkan setelah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua melakukan pemusnahan Mahkota Cendrawasih dengan cara dibakar.

Masih di Jayapura, 15 Oktober 2025, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) melancarkan aksi menolak investasi dan militerisasi di Tanah Papua. Aksi tersebut dibubarkan oleh aparat kepolisian di sore hari dengan menembakkan gas air mata. Asap dari tembakan tersebut menyebar ke pemukiman warga dan sekolah-sekolah dasar. Di tanggal 24 Oktober 2025, bergantian Komite Nasional Papua Barat yang melancarkan aksi memperingati Hari Tani Nasional dan menyerukan desakan pembatalan investasi-investasi yang merugikan masyarakat adat.

Selama satu bulan di tahun 2025, kita dapat melihat tiga kata kunci aksi-aksi yang dilancarkan di Papua berdasarkan tujuannya: investasi, militerisasi, dan penegakkan penghormatan budaya OAP. Sepanjang satu tahun ke belakang, setidaknya 233 protes terjadi di 6 provinsi di Pulau Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang sering melakukan demonstrasi. Di tahun 2024, data ACLED menunjukkan bahwa 425 aksi dilancarkan di Papua. Dari 425 aksi tersebut, 90 diantaranya direspon dengan kekerasan. Keseluruhan aksi di Pulau Papua tersebut adalah 8,1% dari total keseluruhan aksi yang terjadi di tahun 2024.

Perbandingan Aksi (2021 - 2024)



Angka tersebut mencerminkan sangat rendah jika menghitung kejadian represi berdasarkan kejadian aksi. Namun angka ini tidak menunjukkan bagaimana bentuk represi dilakukan terhadap OAP ketika hendak memobilisasi demonstrasi. Peristiwa di lapangan dapat menunjukkan represi dilakukan tidak hanya ketika aksi massa dilancarkan. Beberapa peristiwa dapat menunjukkan pernyataan tersebut.

Kita dapat melihat penangkapan 16 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Tamrauw yang baru saja dilantik menjadi pengurus dan mendeklarasikan berdirinya KNPB. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Polres Sorong. Penangkapan tersebut kemudian berujung penetapan 3 tersangka atas dasar tindakan penyebaran paham "separatisme" (Kurniati, 2023). Di tanggal 12 Agustus 2024, aktivis KNPB juga ditangkap di Nabire ketika membagi-bagikan selebaran ajakan demonstrasi yang hendak dilancarkan pada 15 Agustus 2024. Penargetan anggota KNPB adalah tren. Proyek *Papuan Behind Bars* menyatakan setidaknya dari 531 orang yang ditangkap karena alasan politis atau dipolitisasi di Papua, 211-nya merupakan anggota atau berafiliasi dengan KNPB (Papuan Behind Bars dan Tapol, 2024).

Penangkapan 13 aktivis KNPB di Pasar Lama, Sentani, Jayapura sebagai contoh. LBH Papua yang mendampingi interogasi selama 8 jam menyatakan bahwa tidak ada bukti kejahatan yang dilakukan oleh aktivis KNPB. Mereka ditangkap hanya karena melakukan aktivitas penyebaran selebaran seruan aksi solidaritas pembebasan Victor Yeimo.

“ Di tanggal 12 Agustus, polisi Nabire membubarkan aktivitas penyebaran selebaran aksi 15 Agustus 2024. Tiga anggota KNPB ditangkap dalam operasi tersebut. Di hari aksi, 99 anggota KNPB ditangkap”

Eskalasi penanganan aksi pun berbeda dengan pengamanan aksi-aksi di luar Papua. Kita bisa melihat pada momen 16 September 2025 di Kabupaten

Yalimo, Papua Pegunungan. Aksi protes dilakukan oleh pelajar SMA Negeri 1 Yalimo untuk menolak ujaran rasisme. Aksi direspon dengan pengiriman pasukan militer beserta logistik. Aksi berujung pada kerusuhan dengan dibakarnya rumah seseorang yang dianggap mengeluarkan ujaran rasis. Penanganan secara berlebihan terhadap aksi-aksi non-bersenjata pun juga terjadi di bulan Agustus 2024 ketika rakyat Papua bersiap untuk memperingati Perjanjian New York 1962. Di tanggal 12 Agustus, polisi Nabire membubarkan aktivitas penyebaran selebaran aksi 15 Agustus 2024. Tiga anggota KNPB ditangkap dalam operasi tersebut. Di hari aksi, 99 anggota KNPB ditangkap karena peringatan tersebut. Sedangkan di Wamena, dikabarkan bahwa polisi juga melakukan penangkapan terhadap puluhan anggota KNPB.

Extra Judicial Killing

Di tahun 2020, Pendeta Yeremia disiksa dan ditembak oleh anggota TNI bernama Alpius Hasim Madi. Ia menyiksa dan menembak mati Pendeta Yeremia dalam posisinya sebagai Wakil Komandan Rayon Militer Hitadipa. Dari kasus pembunuhan Pendeta Yeremia kita dapat melihat di tengah konflik kemanusiaan yang tinggi, keberadaan tentara organik dengan jenjang satuan komando kewilayahan sangatlah berpotensi menghasilkan pembunuhan di luar proses hukum terhadap rakyat sipil. Dua tahun berselang, dalam momentum Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua, MPR melalui Bambang Soesatyo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD (kala itu) menyepakati dibutuhkannya pendekatan humanis di Papua (Savitri, 2022).



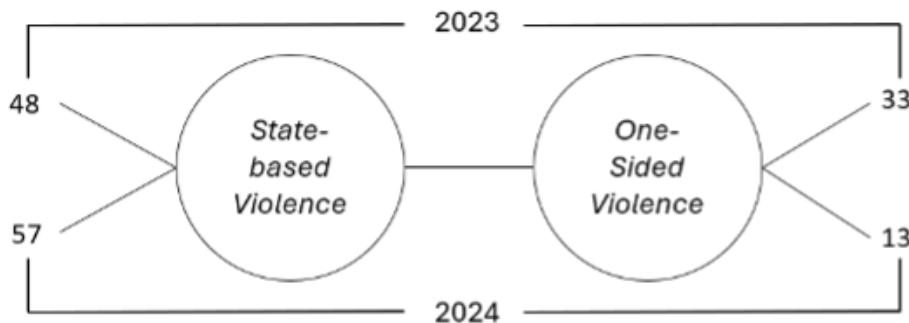
Gambar 3. Persebaran jumlah korban meninggal dalam konflik bersenjata 2018 - 2024

(Sumber: The Uppsala Conflict Data Program)

Melihat peta (Gambar 2) yang digambarkan oleh Uppsala Conflict Data Program, korban jiwa banyak berjatuhan di Papua Tengah. Sebagian besar (berwarna merah) pembunuhan dilakukan oleh aktor negara. Ini menunjukkan pola berulang bahwa kehadiran militer telah berkontribusi akan tingginya angka

pengungsian. Pengungsian ini tidak terbendung melihat bahwa operasi-operasi militer tersebut telah menghasilkan tingginya angka extra judicial killing di Papua. Kendati berbagai macam forum pemerintah menyatakan bahwa pendekatan humanis harus diutamakan dalam menangani masalah kemanusiaan di Papua.

“ Pusat data Uppsala Conflict Data Program menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 - 2024, 151 penduduk Papua meninggal dunia dalam konflik bersenjata”



Gambar 3. korban meninggal dalam konflik bersenjata sepanjang tahun 2023 - 2024
(sumber: The Uppsala Conflict Data Program)

Pusat data Uppsala Conflict Data Program menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 - 2024, 151 penduduk Papua meninggal dunia dalam konflik bersenjata (Lihat Gambar 3). Uppsala membaginya menjadi dua kategori kejadian untuk menentukan korban: state-based violence dan one-sided violence.

Namun, situasi di lapangan tidak sehitam putih itu. Dalam konflik militer di Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pertengahan Oktober 2025 lalu sebagai contoh. TNI Satuan Komando Operasi Habema Kogabwilhan III menyatakan bahwa mereka berhasil menembak mati 14 anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (Supar, 2025). Di sisi lain, TPNPB menyebutkan bahwa dalam operasi tersebut TNI membunuh 15 orang-hanya tiga di antara korban tersebut berstatus sebagai kombatan (Utama & Lokon, 2025).

Siapa yang dapat diidentifikasi sebagai kombatan atau non-kombatan? Ini adalah masalah struktural Pemerintah menangani konflik bersenjata di Papua. Kendati tidak ada pernyataan perang non-internasional, nyatanya konflik bersenjata secara de-facto terjadi di Papua. Konflik bersenjata dengan korban extra judicial killing yang terus menerus terjadi, gelombang pengungsi, serta perusakan objek sipil tiada henti menunjukkan bahwa operasi militer terjadi dan menghasilkan korban sipil secara sistematis. Mobilisasi militer ini tidak pernah dilandasi kebijakan negara seperti yang tertuang dalam Pasal 5) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang mengatur bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.

Fungsi sebagai alat pertahanan ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang yang sama. Yaitu tindakan penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Di dalam Pasal penjelas Pasal 5, yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama ini tidak ada dokumen resmi yang dapat diakses oleh publik. Namun di satu sisi, TNI dalam tindakan operasinya selalu memperlakukan operasi militer ini sesuai dengan Pasal 5. Sebagai contoh, pernyataan Panglima TNI pada April 2024 yang menyatakan "tidak ada negara dalam suatu negara" dalam momen perubahan nomenklatur penyebutan TPNPB dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi Organisasi Papua Merdeka (CNN Indonesia, 2024). Sikap politik TNI ini diperjelas dengan penjelasan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar dengan menunjukkan bahwa TPNPB merupakan "tentara yang punya tujuan politik sendiri" (Samosir, 2024). Sikap ini melangkahi keputusan politik negara.

Pendekatan Militeristik dan Bisnis Militer

Konflik, terutama konflik bersenjata adalah peluang bagi bisnis militer. Ini adalah pola umum. Di Indonesia, contohnya adalah keuntungan yang didapatkan oleh Yanto Soerjosoemarno dari bisnis senjata api, pemasokan ransum tentara dan polisi yang bertugas di lapangan, serta pasokan semen untuk pembangunan dan rehabilitasi asrama tentara dan polisi di seluruh Indonesia (Aditjondro, 2004). Namun konflik itu sendiri juga telah menguntungkan institusi-institusi formal terlibat langsung, tidak hanya mereka yang ada di luar lingkaran pertentangan seperti Yanto. Apalagi, kontrol peredaran senjata api hanya dikuasai secara langsung oleh institusi represi negara pasca swasta dilarang untuk menjalankan bisnis senjata api setelah Soeharto jatuh (Baker & Nasrudin, 2021).

Monopoli ini menghasilkan dua masalah sekaligus. Pertama, akses pengamanan untuk bisnis konvensional di Indonesia mengerucut ke institusi-institusi kekerasan negara. Kedua, bisnis perdagangan senjata api di area konflik besar kemungkinan dilakukan diantara mereka, baik di dalam institusi tersebut, atau institusi dengan pihak non-negara. Kita dapat melihat itu di Papua hari ini dengan tiga pendekatan kasus.

1. Amunisi Produksi PT. Pindad dalam Kasus Jual-Beli Peluru Ilegal Oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional - Papua Barat Oto Jimy M. Yogi di Nabire, Papua Tengah, tahun 2024.

Di tanggal 16 Oktober 2025, Oto Jimy M. Yogi ditangkap oleh aparat gabungan Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Dogiyai ketika melintas di depan Kantor DPR Kabupaten Dogiyai pada 16 Oktober 2024. Polisi menyatakan Jimy terlibat dalam pergeseran amunisi dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Jimy adalah Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army Divisi II Pemka IV Paniai.

Alat bukti yang ditemukan dan menjadi milik Jimy adalah 48 butir Amunisi call 7.62 mm dan 56 butir amunisi call 5.56 mm. Amunisi peluru tersebut didapat dari Otto Burdam setelah tiba di Kabupaten Nabire. Kemudian ditawarkan kepada Jimy dan sepakat dengan harga Rp. 20.000.000. Polisi kemudian melakukan pengembangan dari penangkapan Jimy. Di tanggal 5 November, Otto Burdam ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Ia adalah orang yang menjual amunisi tersebut kepada Jimy. Polisi juga menangkap orang bernama Mozes Rumbrapuk.

Otto Burdam dan Mozes Rumbrapruk adalah seorang sipil. Pertanyaannya, dari mana ia mendapatkan peluru? LBH Papua mencoba mengidentifikasi peluru tersebut. Didapati, amunisi dengan kaliber 7.62 mm dengan nama MU 11-TJ merupakan peluru khusus untuk senapan Sabhara SB1. Peluru ini memiliki spesifikasi tanpa rim, konis, centerfire. Berbentuk pelor bulat, round nose dengan material inti timah dan jaket brass 90. Peluru ini dapat melaju dengan kecepatan 565 m/s. Didapati, amunisi ini diketahui merupakan produksi PT. Pindad. Satu paket, Sabhara SB 1 juga diproduksi secara khusus oleh PT. Pindad untuk memenuhi kebutuhan kepolisian satuan khusus Sabhara.



“ Amunisi dengan kaliber 7.62 mm dengan nama MU 11-TJ merupakan peluru khusus untuk senapan Sabhara SB1. Peluru ini memiliki spesifikasi tanpa rim, konis, centerfire. Berbentuk pelor bulat, round nose dengan material inti timah dan jaket brass 90. Peluru ini dapat melaju dengan kecepatan 565 m/s. Didapati, amunisi ini merupakan diproduksi PT. Pindad.”

Berhubungan dengan izin kepemilikan. Indonesia memiliki sistem yang ketat mengenai perpindahan amunisi yang rumit dan ketat dalam hal kebijakan.

Diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api, akses terhadap senjata api dan amunisinya dikontrol secara monopolistik oleh Polri. Subjek yang diizinkan untuk menguasai senjata api dan amunisi pun sangat terbatas Polisi Khusus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP.

“ Operasi jual beli senjata dan amunisi ini hanya bisa lancar secara ekonomi jika ada kerusuhan/gejolak sosial. Alhasil pendekatan militeristik akan semakin mendorong permintaan senjata dan amunisi meningkat.”

Izin ini dibutuhkan untuk dapat membeli amunisi di PT. Pindad. Dalam proses peradilannya, tidak pernah dapat dibuktikan siapa yang memiliki izin atas distribusi amunisi tersebut. Rantai alur distribusi sebelum amunisi tersebut jatuh ke tangan Otto Burdam tidak dapat ditunjukkan. Besar kemungkinan pola serupa konflik bersenjata di Aceh dimana Angkatan Gerakan Aceh Merdeka mempersenjatai diri dari senjata api yang dibeli dari anggota TNI dan Polri (Aditjondro, 2004). Operasi jual beli senjata dan amunisi ini hanya bisa lancar secara ekonomi jika ada kerusuhan/gejolak sosial. Alhasil pendekatan militeristik akan semakin mendorong permintaan senjata dan amunisi meningkat. Rumus sederhana permintaan dan penawaran ekonomi.

2. Bisnis Penyerobotan Tanah Adat Marga Kipalo dan Intimidasi terhadap Vincent Kipalo

Sejak tahun 2024, seorang pejuang lingkungan dan pimpinan Marga Kipalo, Vincent Kipalo, asal Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, menolak perusahaan perkebunan tebu PT Murni Nusantara Mandiri (PT. MNM) beroperasi di wilayah adatnya. Alasannya karena tanah, dusun dan hutan adat Marga Kipalo merupakan sumber kehidupan masyarakat adat, sumber pangan, mata pencaharian dan obat-obatan yang dapat menjamin mereka hidup turun temurun sejak leluhur.

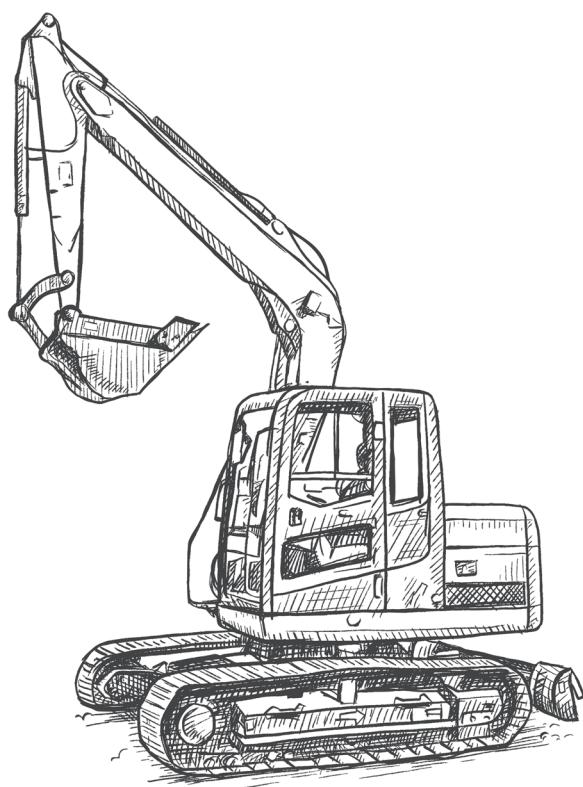
Di saat bersamaan, di tahun yang sama, satuan TNI Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan diterjunkan ke Merauke untuk mendukung program pembangunan nasional, secara spesifik Food Estate. Di Merauke sendiri, kami melihat adanya penerjungan 3 satuan Yonif yang ditempatkan di Kab. Merauke, Kampung Wanam, Distrik Ilwayab. Mendarat serentak di 10 November 2024, masing-masing Yonif ini diisi oleh 691 prajurit. Keberadaan prajurit juga dapat dilihat di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Tentara bersama dengan perusahaan penerima konsesi proyek Food Estate tersebut melakukan pengukuran, pemotongan, dan juga terlibat memberikan penawaran pembelian tanah adat. Ditemukan pula pembangunan sarana prasarana militer di dusun bernama Muckai, yang terjadi semenjak Juni 2025 hingga saat ini.

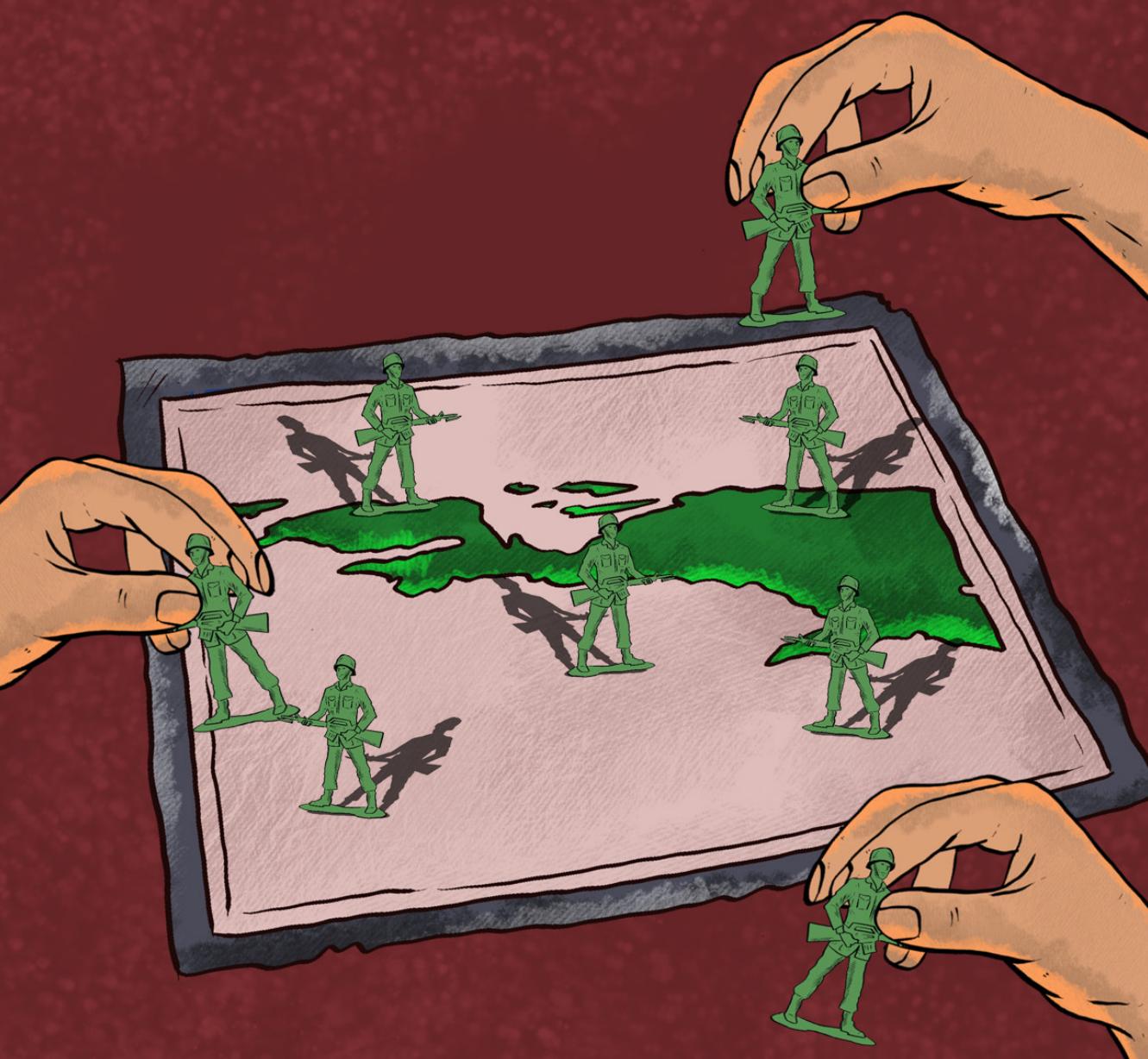
“ Di bulan Desember 2024, Vincent Kwipalo menemukan adanya patok, tanda survey bercat merah yang diduga ditancapkan oleh TNI AD dengan tujuan pengamanan lahan tebu PT. Murni Nusantara Mandiri.”

Di bulan Desember 2024, Vincent Kwipalo menemukan adanya patok, tanda survey bercat merah yang diduga ditancapkan oleh TNI AD dengan tujuan pengamanan lahan tebu PT. Murni Nusantara Mandiri. Di bulan Juni 2025, di lahan adat milik Marga Kwipalo, ditemukan sebuah papan yang tertulis “Tanah Milik TNI AD KODAM XVII/Cenderawasih”. Papan tersebut dipasang setelah warga Marga Kwipalo memasang papan protes penolakan merespon tanaman jati dan karet mereka yang ditebang oleh ekskavator perusahaan. Papan protes tersebut kemudian dibongkar oleh tentara dan diganti.



Sejak Agustus 2024, perusahaan perkebunan tebu PT Murni Nusantara Mandiri, melakukan pembongkaran dan penggusuran hutan, rawa dan savana di wilayah masyarakat adat Yei, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Pertanyaannya, kemana dibawanya kayu-kayu yang dirobohkan tersebut? Sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis pengamanan di PT Freeport menghasilkan bisnis-bisnis sampingan ilegal. Bukan hal yang mengejutkan jika nantinya, para tentara yang bertugas di Merauke terlibat dalam perburuan atau jual beli satwa-satwa liar.





KESIMPULAN

Operasi militer di Papua menunjukkan bukti yang gamblang bahwa keberadaannya telah menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1). Operasi militer untuk melumpuhkan TPNPB-OPM yang menghasilkan konflik membuat OAP harus mengungsi. Diikuti dengan situasi tercerabut dari tempat tinggalnya dan kehilangan sumber penghidupan. Sebagiannya, TNI-Polri juga melakukan pembatasan gerak OAP yang mengakibatkan penurunan produktivitas OAP untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berkebun.

Pengungsian internal di Papua juga tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah secara memadai dengan ditandai absennya pemberian bantuan-bantuan. Bantuan justru muncul dari gereja yang menampung warga pengungsi dan menyediakan lahan-lahan berkebun. Namun ini tidak menjawab penyelesaian masalah struktural sebenarnya. Kehadiran TNI-Polri di area-area "konflik" juga mendekatkan diri mereka pada operasi-operasi bisnis tambang. Tidak ada data jelas dari lapangan sepanjang pengambilan data kami lakukan bagaimana operasi militer ini mendukung operasi tambang. Namun operasi mereka yang dipusatkan di area-area kaya akan tambang emas memberikan gambaran awal untuk mendalami operasi serupa Blok Wabu. Yaitu pengiriman tentara, pengosongan distrik, dan pengjagaan tambang emas.

Gelombang operasi yang menghasilkan kematian warga sipil ini telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua Pasal tersebut masing-masing secara berurutan menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya" dan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu".

Kematian warga sipil dalam operasi-operasi militer tersebut membawa Indonesia melanggar Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

"Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut: Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau

kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan ditempat apapun juga :

- a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b. penyanderaan;
- c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab”.

Operasi militer dan masuknya investasi industri ekstraktif ini yang terus disuarakan dengan metode-metode demonstrasi. Atau, OAP sering menyebutnya sebagai perjuangan non-bersenjata. Namun perjuangan itu juga direspon dengan represi aparat. Represi tidak dilakukan hanya saat demonstrasi-demonstrasi dilancarkan. Namun, aktivitas-aktivitas pra-kondisi aksi juga dibatasi. Penangkapan aktivis KNPB di Nabire ketika sedang membagikan selebaran persiapan aksi menunjukkan dua hal. Pertama, negara takut dengan kampanye-kampanye yang bersifat menjelaskan (edukasi) kepada masyarakat. Kedua, negara takut dengan kesadaran berorganisasi rakyat Papua.

Tindakan tersebut justru memperpanjang pelanggaran negara terhadap konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Penindasan sistematis militer Indonesia tersebut terjadi secara bergelombang-gelombang. Ini seirama dengan bergelombang-gelombangnya aktivitas eksploitasi sumber daya di Papua. Di saat bersamaan, kemiskinan tidak mendapatkan perhatian utama untuk ditangani oleh Pemerintah. Kemiskinan ini semakin diperparah dengan pengabaian pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara terhadap para pengungsi internal secara reguler.

Saran

1. Kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi untuk menghentikan seluruh operasi militer ilegal di Papua serta memerintahkan Panglima TNI Agus Subianto untuk menarik seluruh prajurit militer non-organik dari tanah Papua;
2. Kepada Panglima TNI Agus Subianto untuk menghentikan keterlibatan militer dalam program-program pembangunan;
3. Kepada Pemerintah RI dan DPR RI untuk:
 - a. Mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi orang asli papua;
 - b. Menghentikan seluruh proyek pembangunan dan industri yang mengabaikan partisipasi, akses dan hak asli orang papua;
 - c. Menyusun kebijakan peta jalan pemberian bantuan kemanusiaan secara terukur dan menyeluruh kepada para pengungsi internal;
 - d. Melakukan reformasi keamanan dengan menghilangkan pendekatan militeristik, melakukan pendekatan keamanan secara humanis dan berdasar hukum;
 - e. Tarik militer dari titik-titik konflik, bangun dialog dengan Orang Asli Papua terdampak konflik.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, G. J. (2004). Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua. *Jurnal Ilmu Transformatif*, (XVII).
- Aditya, N. R., & Belarminus, R. (2025, October 16). Kronologi TNI Tewaskan 14 Anggota OPM di Intan Jaya. KOMPAS.com. Retrieved October 29, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/16/16100851/kronologi-tni-tewaskan-14-anggota-opm-di-intan-jaya?page=all>
- Anonim. (2002, April 18). Kontras: Ada Upaya Pengkaburan Motif dalam Kasus Pembunuhan Munir. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontras-ada-upaya-pengkaburan-motif-dalam-kasus-pembunuhan-theys-hol5361?page=2>
- Aswara, D. (2025, September 14). Warga Jalai Intan Jaya Mengungsi Usai Masuknya Pasukan TNI | tempo.co. Tempo.co. Retrieved September 20, 2025, from <https://www.tempo.co/politik/warga-jalai-intan-jaya-mengungsi-usai-masuknya-pasukan-tni-2069739>
- Baker, J., & Nasrudin, R. (2021, May 25). Is Indonesian Police Violence Excessive? The Dynamics of Police Shootings, 2005–2014. *Journal of Contemporary Asia*, 54(2), 181–209. <https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1080/00472336.2022.2138773>
- BBC. (2025, April 21). Papua: Pendulang emas berulang kali tewas di tengah konflik bersenjata Papua, siapa mereka dan mengapa ada di tengah hutan? BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn4wl37w27po>
- CNN Indonesia. (2024, April 11). TNI Beber Alasan Ganti Penyebutan KKB Papua Kembali OPM. CNN Indonesia. Retrieved November 10, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240411072547-20-1085156/tni-beber-alasan-ganti-penyebutan-kkb-papua-kembali-opm>
- Faturahman, A. A. (2025, Mei 27). Minim Perlindungan bagi Gereja di Konflik Papua. tempo.co. https://www.tempo.co/politik/pendeta-gereja-konflik-papua-1560103?n_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbil6lJU3ZDFmN2RlYjI0NWI5ZDjmNDYzMjdjOTE4YTFjN2JlIn0.O3F58_rhHJZgpoqFzZIQ_wP_vr7v1BqvAyzzuxazr3M
- Hernawan, B. (2025, Agustus 31). Operasi Militer di Papua dan Insurgensi TPNPB adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/operasi-militer-di-papua-dan-insurgensi-tpnpb-adalah-konflik-bersenjata-non-internasional/>
- Human Rights Monitor. (2025, Agustus 22). Update Pengungsi Internal Agustus'25: Krisis kemanusiaan di tengah operasi militer yang

- berlangsung. [humanrightsmonitor.org](https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/update-pengungsi-internal-agustus25-krisis-kemanusiaan-di-tengah-operasi-militer-yang-berlangsung/). Retrieved November 9, 2025, from <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/update-pengungsi-internal-agustus25-krisis-kemanusiaan-di-tengah-operasi-militer-yang-berlangsung/>
- Imran. (2025, Mei 9). Polbangtan Kementerian gandeng Yonif TP 802/WMJ Kembalikan Fungsi Lahan Tidur di Merauke. polbangtanmanokwari.ac.id. Retrieved Oktober 22, 2025, from polbangtanmanokwari.ac.id
- Kabar Gunung. (2025, September 11). Tentara Nasional Indonesia (TNI) Non-Organik Masuk Kampung Jalae, Tempati Halaman Gereja Katolik St. Fransiskus dan SD YPPK Jalae Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah. [kabargunung.com](https://kabargunung.com/uncategorized/tentara-nasional-indonesia-tni-non-organik-masuk-kampung-jalae-tempati-halaman-gereja-katolik-st-fransiskus-dan-sd-yppk-jalae-kabupaten-intan-jaya-papua-tengah/). <https://kabargunung.com/uncategorized/tentara-nasional-indonesia-tni-non-organik-masuk-kampung-jalae-tempati-halaman-gereja-katolik-st-fransiskus-dan-sd-yppk-jalae-kabupaten-intan-jaya-papua-tengah/>
- Kemensetneg, H. (2021, November 24). Presiden Jokowi: Investasi Jangkar Pemulihian Ekonomi Indonesia. Sekretariat Negara. Retrieved September 22, 2025, from https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_investasi_jangkar_pemulihian_ekonomi_indonesia
- Kementerian Pertahanan. (2025, Agustus 20). Menhan RI Bersama Tiga Menteri Tinjau Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Bekasi. [kemhan.go.id](https://www.kemhan.go.id/2025/08/20/menhan-ri-bersama-tiga-menteri-tinjau-batalyon-infanteri-teritorial-pembangunan-di-bekasi.html). <https://www.kemhan.go.id/2025/08/20/menhan-ri-bersama-tiga-menteri-tinjau-batalyon-infanteri-teritorial-pembangunan-di-bekasi.html>
- Kurniati, P. (2023, Juni 12). Deklarasi KNPB Tambraw Berujung Penetapan Tersangka Makar, Pelaku Disebut Sebar Paham Separatis. [regional.kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2023/06/12/140800078/deklarasi-knpb-tambräu-berujung-penetapan-tersangka-makar-pelaku-disebut?page=all). <https://regional.kompas.com/read/2023/06/12/140800078/deklarasi-knpb-tambräu-berujung-penetapan-tersangka-makar-pelaku-disebut?page=all>
- LBH Papua. (2025, April 10). Mama-mama Papua Desak Gubernur Papua Selatan Realisasikan Pembangunan Pasar Khusus di Merauke. [facebook](https://web.facebook.com/Lbhpap/photos/merauke-10-april-2025-ikatan-pedagang-pasar-mama-mama-asli-papua-ipm2ap-kembali-/1083800347109011/?_rdc=1&_rdr#). https://web.facebook.com/Lbhpap/photos/merauke-10-april-2025-ikatan-pedagang-pasar-mama-mama-asli-papua-ipm2ap-kembali-/1083800347109011/?_rdc=1&_rdr#
- Loen, A. (2024, Februari 1). TNI kerahkan 10 ribu prajurit amankan Pemilu di tanah Papua. [Jubi.id](https://jubi.id/tanah-papua/2024/tni-kerahkan-10-ribu-prajurit-amankan-pemilu-di-tanah-papua/). <https://jubi.id/tanah-papua/2024/tni-kerahkan-10-ribu-prajurit-amankan-pemilu-di-tanah-papua/>
- Nusantara Atlas. (2025). Mining Concession in Papua. map.nusantara-atlas.org. Retrieved Oktober 22, 2025, from <https://map.nusantara-atlas.org/>
- Papuan Behind Bars dan Tapol. (2024, September). Papuan Behind Bars Annual Overview 2023. Papuan Behind Bars dan TAPOL.
- Puspita, M. D. (2025, July 25). 10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak | [tempo.co](https://www.tempo.co/ekonomi/10-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-miskin-terbanyak-2050924). [Tempo.co](https://www.tempo.co/ekonomi/10-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-miskin-terbanyak-2050924). <https://www.tempo.co/ekonomi/10-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-miskin-terbanyak-2050924>

- Rahmawati, D. (2025, November 24). Menhan Ungkap TNI Akan Bentuk 150 Batalyon Teritorial Pembangunan Tiap Tahun. *detikNews*. Retrieved November 30, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-8226332/menhan-ungkap-tni-akan-bentuk-150-batalyon-teritorial-pembangunan-tiap-tahun>
- Samosir, H. (2024, April 13). Papua: TNI kembali pakai sebutan OPM, Polri masih KKB – ‘Pemerintah tak mampu rumuskan solusi konflik’. *BBC*. Retrieved November 10, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c99zr10nj9ro>
- Savitri, P. I. (2022, Februari 16). MPR dan Pemerintah sepakat perkuat pendekatan humanis di Papua. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/2707649/mpr-dan-pemerintah-sepakat-perkuat-pendekatan-humanis-di-papua>
- SETARA. (2015). Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *setara-institute.org*. Retrieved September 19, 2025, from <https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>
- Supar, E. (2025, October 16). Satgas Habema: 14 anggota OPM tewas saat kontak tembak dengan TNI. *ANTARA News*. Retrieved November 9, 2025, from <https://m.antaranews.com/amp/berita/5178601/satgas-habema-14-anggota-opm-tewas-saat-kontak-tebak-dengan-tni>
- Sloan, J. S. (Ed.). (2013). Genosida Yang Diabaikan: Pelanggaran HAM Di Pegunungan Tengah, Papua, 1977-1978. Asian Human Rights Commission.
- Tempo. (2024, April 15). Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritika hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua. *tempo*. <https://www.tempo.co/politik/perubahan-istilah-kkb-jadi-opm-kronologi-kritikan-hingga-langkah-pendekatan-tni-di-papua-67986>
- UCDP. (2024). Government of Indonesia - OPM. *Upsala Conflict Data Program*. Retrieved September 20, 2025, from <https://ucdp.uu.se/statebased/628>
- Utama, A., & Lokon, P. (2025, Oktober 21). ‘Warga menjaga guru seperti darah daging mereka’ – Siapa sebenarnya yang membunuh guru Melani Wamea di Yahukimo? *bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgw8pp3zgyo.amp>
- Wicaksono, R. A. (2025, September 11). Tambang Nikel Raja Ampat Aktif Lagi, Bahaya Mengintai Lagi. *betahita.id*. <https://betahita.id/news/detail/11403/tambang-nikel-raja-ampat-aktif-lagi-bahaya-mengintai-lagi-.html?v=1757549625>
- Zakaria, R. Y. (2011). MIFEE tak terjangkau angan Malind. *Yayasan Pusaka*.

Profil YLBHI

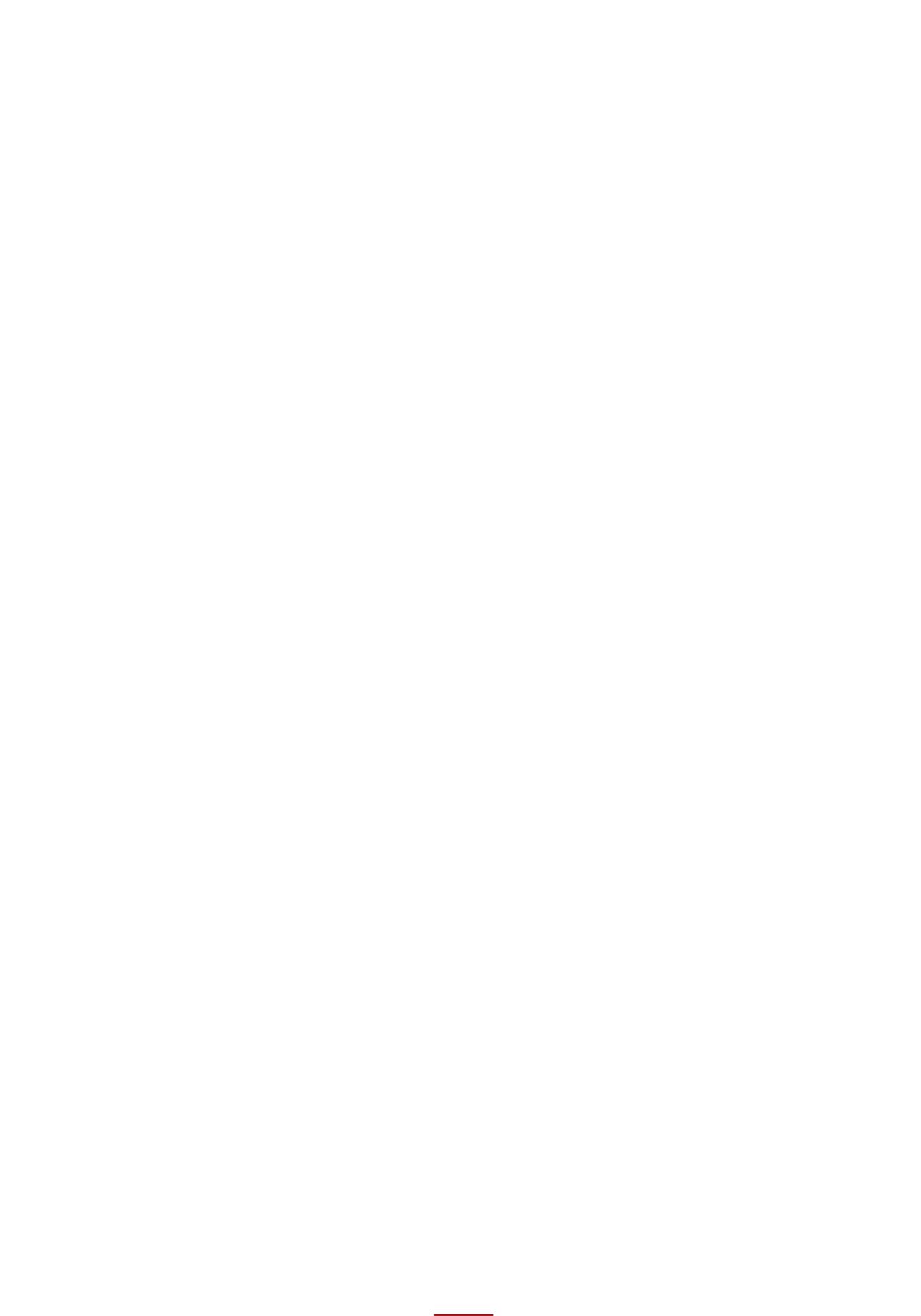
LBH-YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) berdiri pada tahun 1970 atas inisiatif Adnan Buyung Nasution yang didukung oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin. Diawali dengan pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah. Saat ini YLBHI memiliki Kantor-Kantor LBH di 20 Provinsi di Indonesia yaitu: LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Pekanbaru, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Jakarta, LBH Bali, LBH Yogyakarta, LBH Samarinda, LBH Palangkaraya dan Project Base LBH Kalimantan Barat, LBH Surabaya Pos Malang, LBH Papua Pos Merauke dan LBH Papua Pos Sorong,

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan dan kebijakan negara, berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme Orde Baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi fasilitator gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Pemberian bantuan hukum oleh YLBHI tidak terbatas pada lingkup prosedur hukum penanganan kasus per kasus saja, tetapi menjadi sebuah gerakan bantuan hukum struktural bersama masyarakat sipil. Misi YLBHI Akses Keadilan, Reformasi Hukum, dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Ketiga isu utama tersebut, dilakukan secara terintegrasi lewat pemberian pelayanan bantuan hukum dalam bentuk: penanganan kasus, pengembangan sumber daya hukum masyarakat, riset, kampanye dan advokasi kebijakan yang bermuara pada pembelaan hukum dan hak dari masyarakat yang miskin, marjinal dan tertindas secara struktural.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, Kontras, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dibangun oleh YLBHI.

YLBHI terus berupaya Mempertahankan negara hukum, HAM dan demokrasi, dengan menguatkan kesadaran politik dan ekonomi, partisipasi rakyat, dan supremasi sipil, untuk mempersempit kuasa oligarki yang merampas ruang politik, ruang hidup, dan ruang ketatanegaraan.





YLBHI